

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE

COMMUNITY PARTICIPATION IN SMART VILLAGE IMPLEMENTATION

**Irma Purnamasari^{1*}, Yudi Mandega Raswono², Mahamadaree Waeno³,
Azhari Azis Samudera⁴, Agus Suradika⁵**

^{1,2,3,4,5}Doktor Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta-Indonesia

*Korespondensi: Irma Purnamasari. Email: irma.purnamasari@student.umj.ac.id

(Diterima: 10-03-2025; Ditelaah: 21-03-2025; Disetujui: 14-04-2025)

ABSTRACT

The development of digital technology has provided a great opportunity to improve village governance through the concept of smart village. Smart village is an approach to utilizing information technology to support sustainable development in rural areas. The success of this program is not only determined by technological infrastructure, but also by community participation in planning, implementing and evaluating the program. However, community participation in its implementation is still low. Some of the main obstacles include the lack of community understanding of technology, minimal access to information, and busyness and time constraints. This study aims to analyze the level of community participation in the implementation of smart villages and the factors that influence community participation. This study uses a descriptive analysis method with voluntary sampling. The results of the study show that community participation in the implementation of smart villages has not been implemented optimally, this is evidenced by the low values of several indicators, namely community participation in local policy meetings, realization of social participation and evaluation participation. Thus, to support the implementation of smart villages in Bumbung Sembalun Village, a strategy is needed to overcome barriers to participation, including increasing accessibility, incentives, and community-based approaches.

Key words: Community Participation, Smart Village, Smart Governance, Sustainable Development.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan tata Kelola desa melalui konsep smart village. Smart village merupakan pendekatan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Namun partisipasi masyarakat dalam implementasinya masih rendah. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi, minimnya akses informasi, serta kesibukan dan keterbatasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village serta factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan voluntary sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan rendahnya nilai beberapa indikator yaitu partisipasi masyarakat dalam rapat kebijakan local, realisasi partisipasi sosial dan partisipasi evaluasi. Dengan demikian untuk mendukung penerapan smart village di Desa Bumbung Sembalun perlu strategi untuk mengatasi hambatan partisipasi, termasuk peningkatan aksesibilitas, insentif, dan pendekatan berbasis komunitas.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Smart Village, Smart Governance, Pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam konsep smart village menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Smart village merupakan konsep pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola desa, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan (Andrea Caragliu 2011). Smart Village merupakan bagian dari ekosistem Smart City, di mana pembangunan berbasis digital tidak hanya terbatas di kawasan perkotaan tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan. Bangunan utama dari terciptanya tatanan level kota yang baik adalah dengan baiknya level kelurahan dan atau desa sebagai batu bata penyusun bangunan tersebut (Nurrahman 2023).

Smart city dan pembangunan berkelanjutan kini semakin diterima di seluruh dunia sebagai bagian dari perkembangan perkotaan yang membawa manfaat bagi masyarakat (A. K. M. Bahalul Haque, Bharat Bhushan 2021). Kerangka kerja Smart City berperan penting dalam merancang komunitas yang saling terhubung dan harmonis di berbagai tingkatan, memberikan panduan jelas untuk mewujudkan Smart city yang berkelanjutan dan ramah bagi masyarakat di masa depan (Irvine et al. 2023). Beberapa negara dan kota beralih menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan smart city. Dengan memanfaatkan teknologi baru, mereka tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan. melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, mereka dapat mengoptimalkan penggunaan energi serta berbagi informasi untuk menciptakan kehidupan kota yang lebih nyaman dan

berdaya saing. (Fan S, Peng S 2021), (da Silva 2023).

Transformasi digital dalam pemerintahan desa sejalan dengan Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2029 yang menargetkan birokrasi digital, pelayanan public yang lebih cepat, keterlibatan masyarakat, serta tata Kelola yang transparan dan akuntabel. Desa sebagai bagian dari system digital nasional yang mengintegrasikan layanan desa dengan sistem pemerintahan berbasis digital di tingkat kota/kabupaten. Di Indonesia, penerapan smart village telah didorong oleh berbagai kebijakan, termasuk program pemerintah dalam transformasi digital desa guna mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 2023). Kebijakan Smart city di Lombok Timur diatur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Lombok Timur (Bupati 2022). Implementasi konsep smart village akan menjadi pendorong dalam pencapaian target reformasi birokrasi sekaligus mendorong Pembangunan desa yang lebih inklusif, berbasis teknologi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, konsep Smart Village di Desa Bumbung Sembalun Kabupaten Lombok Timur dapat berfungsi sebagai model pembangunan yang mendukung pengembangan Smart City di tingkat kabupaten dan provinsi. Sembalun dikenal sebagai daerah berbasis pariwisata dan pertanian dengan potensi ekonomi yang besar. Pemerintah setempat telah menerapkan berbagai inisiatif digital, seperti penggunaan teknologi pertanian pintar, sistem informasi desa berbasis digital, serta promosi wisata berbasis teknologi. Namun, keberhasilan smart village tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi semata, tetapi juga

pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Berdasarkan tinjauan literatur, banyak penelitian yang membahas penerapan smart village dari perspektif teknologi dan kebijakan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang menyoroiti bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dapat mengoptimalkan penerapan smart village, khususnya di daerah berbasis pariwisata dan pertanian seperti Desa Bumbang Sembalun. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek teknis dan kebijakan, sementara faktor sosial dan partisipasi masyarakat belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keterlibatan mereka.

MATERI DAN METODE

Smart City merupakan sebuah cara untuk mengimplementasikan solusi teknologi ke dalam struktur perkotaan yang ada dengan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta risiko dan bahaya yang muncul (Baron 2012). Kinerja perkotaan saat ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur (modal fisik) saja, namun juga pada ketersediaan dan kualitas komunikasi, pengetahuan dan infrastruktur sosial (Andrea Caragliu 2011). Smart governance bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi cerdas serta kolaborasi bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat lebih inovatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan bersama. (Hong S, Kim N, Lee T 2017), (Hong and Lee 2023). Transformasi menuju smart governance juga membawa

perubahan besar dalam pelayanan publik, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak (Hong and Lee 2023).

Upaya transformasi digital 75.265 desa di Indonesia belum dilakukan secara optimal. Masih banyak ditemukan administrasi desa yang berbasis kertas (manual), hingga pelayanan kepada masyarakat yang masih terbatas jarak dan waktu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Cerdas (Smart Village) yang menargetkan tercapainya 3.000 desa di Indonesia tahun 2024. Penerapan program ini dibagi menjadi 3 fase, fase pertama ditetapkan sebanyak 350 desa, fase kedua sebanyak 1.000 desa, dan sisanya 1.650 ditetapkan di fase ketiga (Kompas, 2023). Smart Village (Desa cerdas) merupakan salah satu langkah inovatif sebagai Upaya mempercepat pembangunan di Indonesia.

Teori partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff relevan untuk menganalisis pola partisipasi dalam smart village. Mereka membagi partisipasi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Dimana Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan tujuan, kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk memastikan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan, Dimana Masyarakat berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan, baik melalui tenaga, material, maupun ide, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap hasilnya; (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Dimana Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari hasil Pembangunan seperti peningkatan kesejahteraan atau akses ke pelayanan public yang lebih baik; (4) Partisipasi dalam evaluasi, Dimana Masyarakat terlibat dalam menilai efektivitas program Pembangunan untuk memberikan masukan dan koreksi bagi

perbaikan di masa depan (Cohen, J. M., & Uphoff 1977).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik pengumpulan data utama. Desain penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan Smart Village (Creswell 2014). Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk melihat pola keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi manfaat dari program yang telah dijalankan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah voluntary sampling, yaitu metode dimana responden secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian (Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim 2016). Teknik ini sering digunakan dalam penelitian sosial untuk memperoleh data dari individu yang memiliki minat terhadap topik yang diteliti.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur variabel yang diteliti. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka yang dikategorikan berdasarkan tiga aspek utama: pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi manfaat. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya berdasarkan metode uji statistik (Sugiyono 2019).

Teknik Pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah voluntary sampling, yaitu teknik di mana responden memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian berdasarkan ketertarikan dan kesediaan mereka (Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim 2016). Meskipun teknik ini

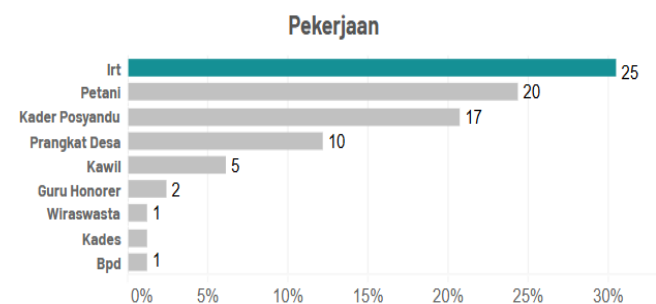
memiliki keterbatasan dalam representasi populasi, teknik ini dapat memberikan wawasan yang baik tentang kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa berbasis Smart Village di Desa Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif. Analisis dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan diagram batang untuk menggambarkan pola keterlibatan responden dalam program pembangunan. Selain itu, ukuran pemusatan dan penyebaran data seperti mean, median, dan standar deviasi digunakan untuk memahami karakteristik partisipasi masyarakat (Triola 2018). Data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yaitu SPSS untuk mempermudah pengolahan dan interpretasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

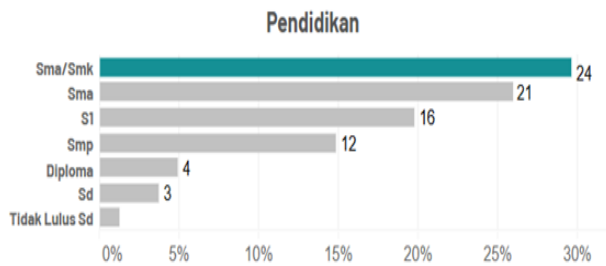
Penelitian ini melibatkan 82 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan usia. Analisis terhadap karakteristik responden memberikan wawasan tentang siapa yang terlibat dalam survei dan bagaimana keterlibatan mereka dalam penerapan Smart Village yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pekerjaan Responden

Jenis kelamin responden terdiri dari 54.88% perempuan (45 orang) dan 45.12%

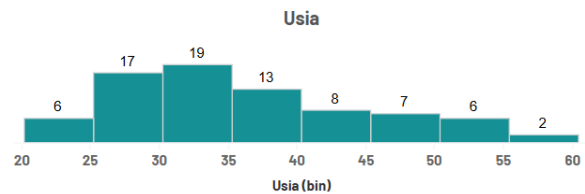
laki-laki (37 orang). Partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Responden memiliki berbagai latar belakang pekerjaan, dengan dominasi kelompok ibu rumah tangga (25 orang) dan petani (20 orang). Profesi lainnya seperti kader posyandu (17 orang), perangkat desa (10 orang), karyawan (5 orang), guru honorer (2 orang), dan wiraswasta (1 orang) memiliki jumlah lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dengan peran domestik dan agraris lebih banyak terlibat dalam survei yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pendidikan Responden

Dari segi pendidikan, sebagian besar responden memiliki pendidikan menengah, dengan SMA/SMK sebagai tingkat pendidikan tertinggi (24 orang), diikuti oleh SMP (16 orang) dan S1 (12 orang). Beberapa responden memiliki pendidikan diploma (4 orang), SD (3 orang), dan tidak lulus SD (2 orang). Pendidikan yang dominan berada pada jenjang menengah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pemahaman cukup terhadap program pembangunan desa. Distribusi usia responden menunjukkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi survei ini. Histogram usia mengindikasikan bahwa usia 30-35 tahun memiliki jumlah responden terbanyak (19 orang), diikuti oleh usia 25-30 tahun (17 orang). Partisipasi mulai berkurang setelah usia 40 tahun, dengan 2 orang pada kelompok usia 55-60 tahun. Distribusi ini menunjukkan bahwa penerapan Smart Village lebih

menarik bagi masyarakat usia produktif dibandingkan kelompok usia yang lebih tua, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Usia Responden

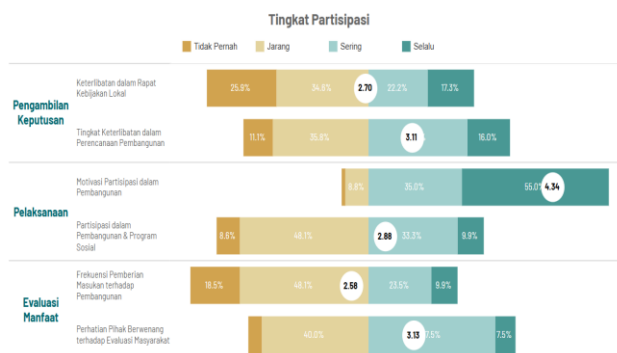
Analisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan

Data penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah dengan rata-rata skor sebesar 2.70. Rincian keterlibatan sebagai berikut: sebanyak 25.9% tidak pernah mengikuti rapat kebijakan lokal, 34.6% jarang terlibat, hanya 22.2% yang sering terlibat dan 17.3% selalu hadir dalam rapat kebijakan lokal. Dari data ini, terlihat bahwa lebih dari separuh masyarakat (60,5%) kurang terlibat dalam musyawarah kebijakan desa. Rendahnya keterlibatan ini bisa menghambat penerapan konsep smart governance, yang menekankan pada transparansi dan partisipasi public dalam pengambilan Keputusan.

Jika dibandingkan dengan rapat kebijakan local, partisipasi lebih baik dalam perencanaan pembangunan dengan rata-rata skor 3.11 dengan rincian 11.1% tidak pernah terlibat, 35.8% jarang, 37.0% sering, dan 16.0% selalu terlibat. Meskipun angka ini lebih baik dibanding keterlibatan dalam rapat kebijakan, namun lebih dari 46.9% Masyarakat masih jarang atau tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam partisipasi public yang bisa mempengaruhi efektivitas penerapan smart village.

Faktor yang menyebabkan rendah nya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan antara lain: (1) kurangnya akses

terhadap informasi sehingga Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang jadwal dan pentingnya rapat kebijakan local; (2) minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi; (3) kesibukan masyarakat dalam pekerjaan dan urusan pribadi dalam menghadiri rapat atau musyawarah desa. Adapun data tingkat partisipasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Tingkat Partisipasi

Analisis partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan

Motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan menunjukkan motivasi yang tinggi dengan rata-rata skor 4.34. Mayoritas responden (55.0%) selalu termotivasi, 35.0% sering termotivasi, 8.8% jarang termotivasi, 1.3% yang tidak pernah memiliki motivasi. Hal ini mencerminkan kesadaran yang baik terhadap pentingnya peran Masyarakat dalam Pembangunan, termasuk dalam penerapan konsep smart village.

Namun terdapat kesenjangan antara motivasi dan partisipasi nyata. Meskipun motivasi tinggi, realisasi dalam partisipasi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 2.88 dengan rincian: sebanyak 8.6% responden tidak pernah ikut serta dalam kegiatan sosial, 48.1% jarang, 33.3% sering, dan hanya 9.9% selalu aktif. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu: (1) kurangnya akses dan fasilitas pendukung sehingga masyarakat kesulitan dalam berpartisipasi; (2) minimnya manfaat langsung yang dirasakan oleh Masyarakat sehingga Masyarakat

kehilangan minat untuk terlibat secara aktif; (3) faktor ekonomi seperti tuntutan pekerjaan dan mata pencaharian yang menghambat partisipasi aktif; (4) Masyarakat belum memahami bagaimana cara terbaik untuk berpartisipasi dalam smart village.

Analisis partisipasi masyarakat dalam Evaluasi Manfaat

Dalam aspek evaluasi manfaat, sebagian besar masyarakat jarang memberikan evaluasi terhadap program pembangunan. Sebanyak 18.5% tidak pernah memberikan masukan, 48.1% jarang, 23.5% sering, dan hanya 9.9% selalu aktif memberi masukan. Rata-rata skor partisipasi dalam evaluasi adalah 2.58, menunjukkan bahwa keterlibatan dalam evaluasi masih rendah. Rendahnya partisipasi dalam evaluasi ini dapat menjadi tantangan bagi penerapan smart village, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan berbasis teknologi. Jika masyarakat tidak aktif dalam mengevaluasi program, maka potensi perbaikan dan inovasi dalam implementasi smart village menjadi terbatas.

Meskipun Tingkat partisipasi dalam evaluasi masih rendah, masyarakat merasa bahwa pihak berwenang cukup memperhatikan masukan yang diberikan. Rata-rata skor perhatian pihak berwenang adalah 3.13, yang menunjukkan bahwa pemangku kebijakan cukup responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun masih terdapat kesenjangan dalam persepsi ini, karena 40.0% masyarakat merasa bahwa meskipun pemerintah atau pemangku kebijakan telah berupaya memperhatikan evaluasi masyarakat, masih ada persepsi bahwa suara mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan Pembangunan desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program disebabkan

beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya pemahaman akan pentingnya evaluasi dimana masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa evaluasi mereka berkontribusi terhadap perbaikan program pembangunan; (2) minimnya mekanisme evaluasi yang mudah diakses sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk menyampaikan masukan; (3) partisipasi dalam evaluasi belum menjadi kebiasaan atau tradisi dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 5. Word Cloud Masukan dan Evaluasi Responden

Berdasarkan analisis word cloud dari masukan responden, dari kata-kata yang muncul menunjukkan beberapa tema utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait penerapan smart village, yaitu :

1. Isu lingkungan dan kesehatan: kata “sampah”, “sanitasi”, dan “kesehatan” menunjukkan bahwa masyarakat menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan serta sistem sanitasi yang lebih baik dalam Pembangunan desa.
2. Transparansi dan keadilan: kata “transparansi”, “pemerataan”, “keterbukaan” dan “anggaran” mengindikasikan adanya harapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang lebih terbuka dan adil.
3. Partisipasi dan keterlibatan Masyarakat: kata “partisipasi”, “diskusi”, “keterlibatan”, dan “peran desa” menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk lebih dilibatkan dalam proses pembangunan.
4. Keamanan dan ketertiban: kata “ketertiban”, “aturan”, dan “resiko”

menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap regulasi dan keamanan dalam program pembangunan desa.

Analisa word cloud mencerminkan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan, transparansi, keterlibatan publik serta ketertiban dalam program pembangunan desa. Penerapan smart village di Desa Bumbung Sembalun perlu mengakomodasi aspirasi ini dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program yang berbasis partisipasi Masyarakat.

Kategorisasi masukan masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan utama dalam beberapa aspek. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, perhatian terhadap kesehatan, ekonomi, perhatian sosial, dan keompakan menjadi isu yang sering diangkat. Dalam kebijakan dan transparansi, transparansi informasi, anggaran optimal, dan pemerataan pembangunan menjadi fokus utama. Dalam pembangunan dan infrastruktur, pembangunan dan kemajuan desa menjadi aspek yang paling diperhatikan. Sementara itu, dalam aspek lingkungan, masalah sampah dan sanitasi menjadi perhatian utama masyarakat. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi, pemerataan, pengelolaan sampah, dan kesehatan merupakan aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat dalam pembangunan Smart Village di Desa Bumbung Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Keterlibatan Masyarakat dalam Penerapan Smart Village di Desa Bumbung Sembalun belum dilaksanakan secara optimal, beberapa indikator masih dinilai rendah terutama keterlibatan masyarakat dalam rapat kebijakan lokal dan realisasi partisipasi sosial. Hal ini disebabkan

minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi, minimnya akses dan fasilitas pendukung, serta keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat.

Rekomendasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village di Desa Bumbung Sembalun yaitu dengan menerapkan strategi yang lebih inklusif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, peningkatan aksesibilitas, insentif dan pendekatan berbasis komunitas, antara lain melalui pembangunan platform digital partisipatif, meningkatkan aksesibilitas teknologi dan informasi, meningkatkan peran pemimpin lokal dan tokoh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. M. Bahalul Haque, Bharat Bhushan, Gaurav Dhiman. 2021. "Conceptualizing Smart City Applications: Requirements, Architecture, Security Issues, and Emerging Trends." Wiley. doi:<https://doi.org/10.1111/exsy.1275>.
- Andrea Caragliu, Chiara Del Bo & Peter Nijkamp. 2011. "Smart Cities in Europe." *Journal of Urban Technology* 18(2): 65–82. doi:<https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>.
- Baron, Marcin. 2012. "DO WE NEED SMART CITIES FOR RESILIENCE." *Journal of Economics & management* 10.
- Bupati, Peraturan. 2022. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Lombok Timur.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 1977. "Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation." Cornell University.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. 2016. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5(1): 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.
- Fan S, Peng S, Liu X. 2021. "Can Smart City Policy Facilitate the Low-Carbon Economy in China? A Quasi-Natural Experiment Based on Pilot City." *Complexity*: 1–15. doi:[10.1155/2021/9963404](https://doi.org/10.1155/2021/9963404).
- Hong S, Kim N, Lee T, Han EJ. 2017. *New Regional Innovation Model: Smart Governance*. Seoul: Youwon Books.
- Hong, Soon Goo, and Don Hee Lee. 2023. "Development of a Citizen Participation Public Service Innovation Model Based on Smart Governance." *Service Business* 17(3): 669–94. doi:[10.1007/s11628-023-00536-w](https://doi.org/10.1007/s11628-023-00536-w).
- Irvine, Kim Neil, Asan Suwanarit, Fa Likitswat, Hansa Srilertchaipanij, Alisa Sahavacharin, Jitiporn Wongwatcharapaiboon, Pranisa Boonkam, Massimo Ingegno, and Shusak Janpathompong. 2023. "Nature-Based Solutions to Enhance Urban Flood Resilience: Case Study of a Thailand Smart District." *Sustainable Water Resources Management* 9(1): 1–23. doi:[10.1007/s40899-023-00821-6](https://doi.org/10.1007/s40899-023-00821-6).
- Nurrahman, Agung. 2023. "Pengembangan Desa Sukapura Menuju Smart Village." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12(2): 89–109. doi:[10.33701/jiwbp.v12i2.3055](https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3055).
- Perpres. 2023. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- Da Silva, Jonas Gomes. 2023. "Guidelines for a Participatory Smart City Model to Address Amazon's Urban Environmental Problems." *PeerJ Computer Science* 9. doi:[10.7717/PEERJ-CS.1694](https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.1694).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Triola, M. F. 2018. *Pearson Elementary Statistics*.